

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN DI ERA DIGITAL

Arifin Tahir¹, Asna Aneta², Vivi Venti Vera Sulila³, Dwi Indah Yuliani Solihin⁴
arifin_tahir@ung.ac.id¹, asnaatiek.aneta@ung.ac.id², viviventivera@ung.ac.id³,
dwiindah@ung.ac.id⁴
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pembangunan kota berkelanjutan di era digital serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala implementasinya pada pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi kebijakan, laporan program Smart City, publikasi ilmiah, serta observasi non-partisipan terhadap layanan digital perkotaan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan pembangunan kota berkelanjutan berbasis digital mencakup penguatan kebijakan terintegrasi, pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital, fragmentasi kebijakan antarinstansi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta isu keamanan data. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan kota berkelanjutan berbasis digital.

Kata Kunci: Kota Berkelanjutan, Transformasi Digital, Smart City, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dan tata kelola perkotaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring pesatnya urbanisasi dan perkembangan teknologi digital. Konsep pembangunan kota berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Dalam konteks tersebut, transformasi digital dipandang sebagai instrumen strategis yang mampu memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel (Sivarajah et al., 2016).

Di Indonesia, arah kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan tercermin dalam integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Inisiatif seperti Gerakan Nasional Smart City mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan perkotaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan (Athallah, 2022). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan merata dan masih menunjukkan perbedaan kapasitas antarwilayah.

Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kota berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat (Basri et al., 2021). Pemanfaatan teknologi digital tanpa didukung kebijakan terintegrasi dan sumber daya manusia yang memadai berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan dan ketimpangan akses layanan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis strategi kebijakan pembangunan daerah dan tata kelola perkotaan berkelanjutan di era digital, dengan tujuan mengidentifikasi peluang serta tantangan implementasinya di tingkat pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika kebijakan pembangunan kota berkelanjutan berbasis digital. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan, laporan Smart City, serta publikasi ilmiah yang relevan. Data primer dikumpulkan melalui observasi non-partisipan terhadap pemanfaatan layanan digital perkotaan.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik yang meliputi proses pengkodean, pengelompokan tema, dan penafsiran makna data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola kebijakan serta tantangan implementasi pembangunan kota berkelanjutan di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan tata kelola perkotaan berkelanjutan. Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Pemanfaatan sistem informasi perkotaan, aplikasi layanan publik, dan dashboard pembangunan daerah memungkinkan pemerintah memantau kinerja pembangunan secara real time dan berbasis data. Praktik ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif dan akuntabel, khususnya dalam pengendalian lingkungan, pengelolaan tata ruang, dan peningkatan efisiensi pelayanan masyarakat.

Namun demikian, efektivitas kebijakan pembangunan kota berkelanjutan berbasis digital masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala. Kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, fragmentasi kebijakan akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan literasi digital masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, isu keamanan dan perlindungan data juga menjadi tantangan serius yang perlu diantisipasi untuk menjaga kepercayaan publik.

Pembahasan Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah dan tata kelola perkotaan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Transformasi digital berfungsi sebagai enabler yang mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, namun memerlukan kerangka kebijakan yang terintegrasi dan konsisten.

Integrasi data lintas sektor terbukti mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih adaptif, terutama dalam merespons isu lingkungan, mobilitas perkotaan, dan pelayanan publik. Selain itu, pemanfaatan platform digital membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas, meskipun belum sepenuhnya inklusif akibat perbedaan akses dan kemampuan teknologi.

Oleh karena itu, strategi pembangunan kota berkelanjutan di era digital perlu diarahkan pada penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kebijakan perlindungan data. Pendekatan ini penting agar transformasi digital benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pembangunan daerah dan tata kelola perkotaan berkelanjutan di era digital memerlukan strategi kebijakan yang terintegrasi antara teknologi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Transformasi digital terbukti mampu meningkatkan efektivitas

perencanaan pembangunan, transparansi tata kelola, serta kualitas layanan publik di tingkat daerah. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor pemerintah daerah.

Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi digital berperan sebagai enabler pembangunan daerah, bukan sebagai tujuan akhir. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memastikan integrasi dan keamanan data perkotaan. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan tata kelola perkotaan yang berkelanjutan dan adaptif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Athallah, R. (2022). Reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 115–128.
- Basri, H., Pratama, R., & Lestari, D. (2021). Good governance dalam pembangunan daerah berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45–57.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Sivarajah, U., Irani, Z., Weerakkody, V., Waller, P., & Lee, H. (2016). Challenges and opportunities in big data-driven public sector transformation. *International Journal of Information Management*, 36(6), 1191–1203. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.07.002>.